

PERANAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Jaminta Sinaga

Fakultas Ekonomi - Universitas Methodist Indonesia

Email : jamintasinaga@gmail.com

ABSTRAK

Suatu negara disebut baik apabila pejabat publik memiliki hati nurani untuk menaikkan atau menciptakan masyarakat publik semakin meningkat. Tidak hanya dari sudut ekonomi saja, tetapi termasuk : politik, keamanan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang dipercaya. Di Indonesia, perhatian pejabat publik untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah : Munculnya OTONOMI DAERAH , dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Dengan demikian munculnya manajemen pemerintahan daerah yang bersifat otonomi menuju pemerintahan yang baik (good government) dan munculnya pengelolaan keuangan atau tata kelola keuangan yang baik (good governance). Untuk pemerintahan yang baik diperlukan : Pemimpin yang : Jujur, objektif, integritas, independen dan selalu mengutamakan kepentingan publik dalam arti mengabaikan kepentingan pribadi, kelompok dan lain-lain. Pengelolaan atau tata kelola keuangan yang baik diperlukan : participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity and equality, efficiency and effectiveness, accountability dan strategic vision. Untuk dapat terwujudnya hal tersebut diperlukan : Reformasi anggaran, reformasi kelembagaan, reformasi sistim informasi akuntansi, reformasi audit dan reformasi manajemen.

Di Indonesia menuju keadaan pemerintahan yang baik dan pengelolaan atau tata kelola keuangan yang baik masih dalam proses. Ada banyak perubahan Undang-Undang selalu menuju kearah penyempurnaan. Juga masih banyak didapat pejabat publik masih sulit menanggalkan kepentingan pribadi atau kelompok merubah sikap untuk mengutamakan kepentingan publik. Hal ini disebabkan karena pemberian sanksi hukum kepada para koruptor masih abu-abu dalam arti sanksi hukum masih leha-leha sehingga tidak memberikan efek jera kepada para koruptor.

Kata kunci : Akuntansi Manajemen Sektor Public; Reformasi Publik; Good Government; Good Governance ; Akuntabilitas Publik.

PENDAHULUAN

Istilah sektor publik telah dikenal pertama kali pada tahun 1952 dengan sebutan public sector (Oxford English Dictionary, 2nd ed, 1989 p.779). Kalau diartikan lebih luas merupakan sutau manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik yang menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Sektor publik berbeda dengan sektor

swasta yang pengelolaan keuangan dilakukan oleh swasta yang disebut sektor private. Istilah sektor publik tertuju kepada sektor negara , usaha negara dan organisasi nirlaba negara (Joedono, 2000). Sebelumnya pun oleh Abdullah (1996) menyebutkan bahwa sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau

pelayanan masyarakat seperti : kesehatan, pendidikan dan keamanan. Selanjutnya sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi atau pemerintah. Lebih lanjut lagi menurut Jones dan Pendlebury tahun 1996 mengemukakan bahwa istilah sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di Amerika Serikat istilah ini adalah untuk akuntan swasta yang berpraktik untuk masyarakat, sedangkan di Inggris (Eropa), istilah tersebut adalah untuk akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah. Dengan demikian, istilah sektor publik yang umum dipahami adalah akuntansi untuk organisasi pemerintah. Di Indonesia istilah sektor publik semakin populer sejak masa reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Negara maupun daerah merupakan organisasi sektor publik yang menjadi wadah reformasi yang dapat dianggap merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumberdaya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar, melakukan transaksi ekonomi dan keuangan tetapi tujuan pengelolaannya bukan mencari keuntungan, dimiliki secara kolektif oleh publik dan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi selalu didasari atas undang-undang atau peraturan yang menguntungkan oleh publik. Reformasi pemerintahan dan keuangan negara dimulai setelah keluarnya Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang undang no. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok

Pemerintahan di Daerah dan Undang Undang no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pengganti Undang Undang no. 32 tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan Negara dan Daerah. Munculnya undang undang ini disebabkan oleh desakan masyarakat agar pejabat publik segera melakukan perubahan secara menyeluruh dalam mencapai tujuan yang sudah diamanatkan pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 berisikan tentang otonomi daerah yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur, mengurus dan mengelola hasil daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah yang bersangkutan. Tetapi tidak sepenuhnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, kecuali beberapa hal yang masih dipegang teguh atau dikelola oleh pemerintah pusat, misalnya : pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, bidang politik luar negeri, agama, serta kewenangan bidang lain. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 di Indonesia terdapat tiga asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

- a. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

c. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu, yang serta pembiayaan, sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Selama beberapa tahun kemudian pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kemudian menyadari masih terdapat banyak aspek yang menjadi kelemahan yang sekaligus ceah dari peraturan perundangan yang sering menimbulkan keracuan. Selain itu disadari pula bahwa isi UU No. 22/1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggara otonomi daerah yang lebih efisien, maka dikeluarkanlah UU No.32 tahun 2004 pengganti Undang Undang no.22 tahun1999 tentang Pemerintah daerah dan Undang No.33 tahun 2004 pengganti Undang Undang no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan daerah.

Keistimewaan dari Undang Undang ini adalah adanya semangat tatakelola yang baik (good governance) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan mendekatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi sumber daya daerah.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal tentang reformasi struktur pemerintahan dan keuangan negara/daerah menuju pertanggungjawaban publik yang akuntabel, yaitu :

- a. Perubahan pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis.-
- b. Pengelolaan keuangan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.
- c. Pertanggungjawaban keuangan : Yang satu arah menjadi dua arah.
- d. Penyusunan APBN/APBD ‘ Sistim tertutup menjadi terbuka.

Kemandirian, kemampuan, serta kejujuran pejabat publik merupakan syarat utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam melaksanakan tugasnya, semua pejabat publik harus berpedoman kepada konsep kepemimpinan yang baik yang ada pada fungsi-fungsi manajemen yaitu ; fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi stafing, fungsi directing dan fungsi pengawasan/pengendalian. Fungsi manajemen yang dikemukakan dalam usaha sektor swasta diadopsi oleh sektor publik. Fungsi perencanaan diisi dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase. Fungsi organisasi ditandai dengan pemerintahan yang dipimpin seorang : Presiden/gubernur/bupati/walikota, Fungsi stafing yang ditandai dengan : Kementerian departemen dan non departemen/satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Fungsi directing yang ditandai dengan arah kepemimpinan yang ada pada GBHN dan fungsi pengawasan ditandai dengan adanya regulasi dalam bentuk Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang yang dibuat oleh DPR, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden dan Kementerian dan lain-lain. Presiden, Gubernur, Bupati /Walikota sebagai pejabat publik diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang memerlukan setiap

akhir tahun. Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut kepada publik harus mengikuti atau sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2005 di dalam buku Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP. Dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah yang dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat publik laporan pertanggungjawaban yang disusun bertujuan untuk membuat keputusan yang tepat sebagai mana yang diatur di dalam undang-undang, selalu menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemegang kepentingan (stakeholder) yang merupakan fungsi pokok dari akuntansi manajemen sektor publik. Sekarang ini setiap laporan yang disusun oleh pemerintah wajib diperiksa oleh badan tertentu yang sifatnya independen, yaitu : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan yang lebih independen lagi oleh : Kantor Akuntan Publik (K.A.P). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, disampaikan dan dilaporkan kepada DPR. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP pusat, disampaikan dan dilaporkan kepada Presiden, sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, disampaikan dan dilaporkan kepada pemberi tugas.

Perumusan Masalah.

Dari berbagai latar belakang yang dikemukakan di atas dapatlah dikemukakan perumusan masalah, yaitu : Apakah Undang Undang no.32 tahun 2004 telah diterapkan di Indonesia,

khususnya pada Pemprop. Sumatera Utara-Medan?

Uraian Teoritis.

Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik terkesan masih relatif baru di khasanah akuntansi di Indonesia. Namun kalau dilihat dari sejarah organisasi sektor publik, sudah dikenal dan ada sejak ribuan tahun yang lalu sebagaimana dikutip oleh Indra Bastian (2001) yang menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi oleh interaksi dan kekuatan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Praktek pencatatan telah dilakukan di jaman Mesir Kuno yang merupakan dasar penyusunan laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Mengalami tahap perkembangan yang semakin cepat pada masa merkantilisme pada abad ke 15 sampai abad ke 17 kekuatan ekonomi telah berpindah dari Italia ke Inggris. Diperlukan laporan lebih rinci oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan perdagangan. Di Indonesia pada masa-masa sebelumnya pelayanan atau kinerja sektor publik sangat rendah dibandingkan dengan negara negara lain seperti : Korea Selatan, Malaysia , Thailand , Taiwan dan lain-lain. Setelah ada reformasi pemerintahan dan tata kelola keuangan negara/daerah maka akuntansi sektor publik sudah mulai dipopulerkan. Akuntansi yang mengelola keuangan pusat dan daerah disebut akuntansi pemerintahan. Dengan bergulirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25

tahun 1999 dan telah disempurnakan dengan mengganti Undang Undang nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang Undang no 32 Tahun 2004 dan Undang Undang no.25 tahun 1999 diganti menjadi Undang Undang no.33 tahun 2004 maka akuntansi pemerintahan diganti namanya menjadi Akuntansi Sektor Publik. Semua Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta telah mengganti mata kuliah akuntansi pemerintahan menjadi mata kuliah akuntansi sektor publik. Pergantian nama ini terutama disebabkan oleh perubahan reformasi keuangan negara yang menuntut pengelolaan yang *good governance* untuk kepentingan semua pemegang kepentingan (analisis ekonomi, rakyat, badan eksekutif, BPK, Pemerintah pusat, DPRD, Investor, Kreditor dan Donatur). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan dengan teori akuntansi keuangan. Mempelajari teori akuntansi mempunyai tujuan, antara lain:

- a. Untuk memahami praktek akuntansi yang ada pada saat ini.
- b. Mempelajari kelemahan dan kekurangan praktek akuntansi yang ada.
- c. Memperbaikii praktek akuntansi untuk masa yang akan datang.

Salah satu kelemahan akuntansi pemerintahan adalah seolah-olah akuntansi pemerintahan menyusun laporan pertanggungjawaban untuk kepentingan pemerintah (bersifat internal) bukan kepada publik pada hal yang dikelola pemerintah adalah dana atau uang publik. Melihat fenomena yang terjadi di Negara Indonesia yang semakin maraknya : Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sudah waktunya

pemerintah bekerja dan menyusun laporan yang akuntabel dengan tujuan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, paling tidak mengurangi.

Untuk membahas lebih jauh akuntansi sektor publik yang berujung kepada akuntansi manajemen sektor publik terlebih dahulu dikemukakan definisi akuntansi sektor publik. Menurut Prof.Dr.Abdul Halim, MBA,Akt. Dalam bukunya : Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (2001):

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan . Dari pengertian di atas dapat dikemukakan beberapa istilah yaitu:

Informasi kuantitatif yaitu data keuangan yang sudah diolah ke dalam bentuk yang lebih berarti yang dapat diukur dengan satuan moneter dalam hal ini rupiah dalam satuan uang (mata uang Indonesia). Entitas pemerintah dalam hal ini berfokus kepada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden dibantu oleh staf kementerian, Propinsi dipimpin oleh seorang gubernur, Kabupaten /Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota disebut Pemerintah Daerah (PEMDA) sehingga muncullah akuntansi sektor publik dengan sebutan : "Akuntansi Keuangan Daerah" yang dapat dibagi dua yaitu :

1. Akuntansi manajemen yaitu akuntansi untuk internal (hasil penyusunan laporan ditujukan untuk pihak internal

dari pejabat publik).

2. Akuntansi keuangan yaitu akuntansi untuk eksternal (hasil penyusunan laporan ditujukan untuk pihak luar dari pejabat publik).

Setiap organisasi sudah pasti akan berkaitan dengan uang. Akuntansi sektor publikpun berkaitan dengan uang, karena organisasi negara atau daerah yang disebut juga pemerintahan akan berhubungan dengan uang dan hal ini akan memerlukan manajemen keuangan (Henley et al : 1990). Di Indonesia setiap tahun selalu ada penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBN/APBD. Dalam APBN/APBD inilah pejabat publik menetapkan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh negara/daerah dan berusaha mencari sumber-sumber keuangan untuk menutupi segala bentuk kegiatan yang akan dan yang sudah dilakukan. Semua penggunaan sumber-sumber harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah dan relevan dan akurat yang dapat dipercaya keberadaannya dan juga mengenai pertanggungjawaban sumber-sumber keuangan harus dapat dibuktikan keabsahaannya. Di Indonesia sumber keuangan negara /daerah yang paling besar untuk dapat menutupi belanja atau pembiayaan publik adalah pajak yang dapat ditaksir sekitar 65% s/d 75% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan. Penggunaan Anggaran Pendapatan dibagi atas dua kelompok yaitu :

- a. Belanja , yang terdiri dari :

^Belanja Aparatur negara/ daerah.

^Belanja Pelayanan publik.

^Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

^Belanja tidak tersangka.

- b. Pembiayaan, yang terdiri dari :

^Penerimaan daerah.

^Pengeluaran daerah

Sebelumnya, penggunaan anggaran pendapatan ditujukan untuk menutupi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan atau modal.

Akuntansi Keuangan sektor publik.

Di sektor publik, kebutuhan akan informasi keuangan semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga publik . Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk memenuhi kebutuhan ini dimunculkanlah akuntansi keuangan sektor publik yang merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik, sistim akuntansi sektor publik dan juga manajemen akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan sektor publik dapat menyediakan informasi keuangan baik kepada pemerintah maupun sebagai alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, perencanaan operasional, pembuatan program, penyusunan anggaran, melakukan

evaluasi kinerja atau analisa umpan balik sampai kepada pelaporan kinerja.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa kegiatan utama dari akuntansi adalah melakukan proses terhadap data yang tersedia yang dimulai dari : dokumen diolah dalam buku jurnal, dari buku jurnal diposting ke buku besar, saldo buku besar disajikan dalam bentuk neraca saldo atau neraca percobaan, selanjutnya dibuat beberapa jurnal penyesuaian terhadap beberapa jenis akun atau rekening. Kelengkapan ayat jurnal penyesuaian dengan neraca saldo disajikan dalam bentuk neraca lajur yang terdiri dari berbagai lajur sesuai dengan kebutuhan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik (modal), laporan arus kas, daftar neraca atau laporan posisi keuangan serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Dalam akuntansi sektor publik, proses akuntansinya tidak berbeda dengan proses akuntansi yang ada pada akuntansi perusahaan atau akuntansi komersil, yang ada perbedaan adalah laporan keuangan yang diterbitkan. Pada akuntansi keuangan sektor publik, laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran Pendapatan dan Biaya.
2. Laporan arus kas.
3. Laporan kinerja keuangan.
4. Laporan perubahan aktiva.
5. Neraca.
6. Catatan atas laporan keuangan.

(Undang-undang nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan revisi Undang-Undang No.17 Tahun 2003).

Dari berbagai uraian yang telah disebutkan di atas maka akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi / kegiatan suatu entitas (pemerintah, swasta maupun organisasi sosial lainnya) (Muindro Renyowijoyo, 2008, hal. 26).

Akuntansi manajemen sektor publik.

Dari berbagai literatur dapat diartikan bahwa akuntansi manajemen merupakan bidang khusus akuntansi yang mengolah data keuangan sampai kepada penyusunan laporan keuangan dan laporan lainnya yang akan dipergunakan oleh pimpinan atau manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, baik keputusan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kalau ada pertanyaan, mana lebih luas akuntansi keuangan dibandingkan dengan akuntansi manajemen?. Tentu jawabnya adalah akuntansi manajemen karena menyangkut banyak hal informasi yang diperlukan oleh akuntansi manajemen. Bila mengingat dari sudut pemeriksaan, pemeriksaan akuntansi keuangan bersifat general (umum) karena tujuan pemeriksaan adalah menilai kewajaran tentang penyajian laporan keuangan yang dapat disandingkan atau dimatching (ditandingkan) dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sedangkan pemeriksaan atas akuntansi manajemen dilakukan dengan istilah manajemen audit yang sangat lebih mendetail dibandingkan dengan pemeriksaan laporan keuangan dan tujuan pemeriksaan adalah untuk

mengukur kinerja dalam hal ini efisiensi dan efektifitas masing-masing unit perusahaan. Oleh sebab itu pemeriksaan manajemen sering disebut sebagai pemeriksaan kinerja (performance audit). Selain itu dalam akuntansi manajemen, setiap pimpinan harus memahami teknik penyusunan laporan keuangan sebagai output proses akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen tidak sebatas sampai penyusunan laporan keuangan dan yang lebih penting lagi adalah sampai kepada analisa dan pengaruh (dampak) hasil analisa laporan keuangan kepada pemakai (pengguna) yang disebut dengan istilah outcome.

Dari berbagai uraian yang telah disebutkan di atas, peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/walikota. Akuntabilitas publik merupakan salah satu sifat akuntansi sektor publik yang usaha pokoknya adalah untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama korupsi yang menjadi salah satu kejahatan politik yang sangat menghambat kesejahteraan masyarakat yang adil merata. Munculnya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang menegaskan bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan yang tentunya termasuk informasi tentang keuangan. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah agar lembaga publik atau pejabat publik atau siapa saja pelaku organisasi publik agar terhindar dari tata

kelola keuangan publik yang dapat merugikan masyarakat.

Akuntabilitas publik.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang bersifat akuntabel, transparan, tepat dan cepat dan terhindar dari segala bentuk kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Apabila pertanggungjawab-an itu menyangkut kepentingan publik maka disebut akuntabilitas publik. Kembali disebutkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro Renyowijoyo, 2008, hal.21).

Akuntabilitas publik ada dua macam, yaitu :

- a. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR-RI.
- b. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dari dua akuntabilitas ini yang paling dominan memberantas korupsi adalah akuntabilitas horizontal karena

menyangkut kepentingan hidup orang banyak di negara tersebut yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia disamping akuntabilitas vertikal yang sedikit banyak selalu tunduk kepada lembaga publik yang lebih tinggi sehingga diduga pertanggungjawaban vertikal sering tidak bisa bebas dari kepentingan pihak yang lebih tinggi. Untuk dapat menuju dan mencapai serta menciptakan masyarakat yang sejahtera terlebih dahulu diawali reformasi di pemerintahan di bidang :

- a. Reformasi sistim anggaran.
 - b. Reformasi sistim akuntansi.
 - c. Reformasi sistim pemeriksaan.
 - d. Reformasi sistim manajemen keuangan.
 - e. Reformasi sistim kelembagaan
- (Mardiasmo, 2002, Hal. 19-20).

Reformasi sistim anggaran menyangkut tentang : penyusunan anggaran secara terbuka, pemerataan alokasi anggaran, mendahulukan kepentingan masyarakat untuk lebih sejahtera.

Reformasi sistim akuntansi, menyangkut tentang pencatatan serta pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban yang terbuka dan bebas diketahui oleh masyarakat luas. Reformasi sistim pemeriksaan, menyangkut tentang pemeriksa yang independen, penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat, pelaksanaan pemeriksaan yang dapat dipercaya dan seluruh pertanggungjawaban akuntansi harus terlebih dahulu diperiksa oleh pihak yang independen. Reformasi sistim manajemen keuangan, menyangkut tentang perencanaan dan pendalian keuangan yang efisien, efektif dan

ekonomis seperti yang tercantum dalam value for money. Mengutamakan pemimpin yang akuntabel, jujur, objektif dan cepat membuat keputusan yang komprehensif bukan kepentingan sekelompok atau individu. Reformasi sistim lembaga, menyangkut tentang pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari semua pejabat atau lembaga publik di haruskan memiliki sikap, yaitu :

- a. Accountability for probity and legality (akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum).
- b. Process accountability (akuntabilitas proses).
- c. Program accountability (akuntabilitas program).
- d. Policy accountability (akuntabilitas kebijakan). (Mardiasmo, 2002)

Akuntabilitas kejujuran menyatakan agar semua pelaku lembaga atau negara mulai dari pusat sampai ke daerah tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pihak tertentu. Akuntabilitas hukum menghendaki agar semua pejabat atau lembaga publik mematuhi semua yang sudah dinyatakan dan ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Akuntabilitas proses menyangkut tentang pelayanan publik yang cepat, responsif, murah biaya, kualitas produk yang tinggi, prosedur yang digunakan cukup dan memadai serta kecukupan sistim informasi akuntansi, sistim informasi manajemen dan sistim administrasi yang efisien dan efektif. Akuntabilitas program mencakup kepada penetapan langkah-langkah yang di

rancang untuk mencapai tujuan, mengutamakan kepentingan yang paling mendesak karena kebutuhan dana yang tersedia terbatas (masalah prioritas pencapaian) serta memperhatikan penggunaan dana yang hemat tetapi hasil optimal. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas dalam arti mengutamakan atau mendahulukan kemakmuran rakyat banyak. Reformasi yang dimaksudkan diutamakan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Menurut UNDP (United Nation Development Program) ada beberapa karakteristik dalam tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu :

- Participation.
- Rule of law.
- Transparency.
- Responsiveness.
- Consensus orientation.
- Equity and equality
- Efficiency dan effectiveness.
- Accountability.
- Strategic vision.

Peran akuntansi manajemen sektor publik.

Kegiatan akuntansi manajemen sektor publik tidak terlepas dari kegiatan perencanaan dan pengendalian. Kegiatan perencanaan dan pengendalian merupakan kegiatan yang paling utama dilakukan karena : perencanaan tanpa pengendalian sudah tentu hal-hal yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik, demikian juga kegiatan pengendalian

dilakukan karena ada tujuan perusahaan yang hendak dicapai seperti yang sudah digariskan dalam kegiatan perencanaan. Adapun proses perencanaan dan pengendalian dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut :

- a. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar.
- b. Perencanaan operasional.
- c. Penganggaran.
- d. Pengendalian dan pengukuran.
- e. Pelaporan analisis dan upan balik.

Adapun urutan dari langkah proses perencanaan dan pengendalian tersebut terlihat bahwa awal dari kegiatan manajemen sektor publik adalah penetapan tujuan dan sasaran dalam perencanaan. Langkah berikutnya adalah perencanaan operasional yaitu kegiatan yang akan dilakukan termasuk hal apa saja yang pelaksanaannya dalam situasi yang mendesak untuk pemenuhan kebutuhan publik dan hal-hal yang dilakukan secara bertahap. Langkah berikutnya adalah menyusun anggaran yang akan dipakai untuk pencapaian tujuan tersebut dengan mempertimbangkan kesediaan dana yang dimiliki. Selama dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian, baik langsung ataupun tidak langsung. Pengendalian langsung yaitu dengan cara pengamatan langsung di tempat atau pada objek yang dikerjakan atau dibangun (anggaran pembangunan). Pengendalian tak langsung dilakukan melalui laporan yang disusun dan disampaikan oleh pelaksana sesuai dengan tahapan pelaksanaan sampai selesainya pekerjaan. Tahap terakhir adalah melakukan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan hasil kegiatan dengan

tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Hasil dari analisis adalah menilai kinerja serta memberikan umpan balik untuk memberikan masukan atau saran untuk perbaikan semua perencanaan berikutnya.

Menurut Mardiasmo, Akuntansi Sektor publik, hal.37, peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik, adalah :

a. Perencanaan strategik.

Dalam pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu peenyusunan berbagai program dengan skala prioritas dan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu diperlukan informasi manajemen untu menentukan jumlah biaya program (cost of program), dan menentukan biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga diharapkan pengalokasian dana dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Keandalan sistim informasi akuntansi manajemen akan dapat mengurangi terjadinya : pemborosan, kebocoran dana, dan dapat mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Informasi akuntansi manajemen disektor swasta memberikan informasi kepada pihak internal agar dapat mengevaluasi kegiatan internal untuk memperbesar jumlah laba yang akan diperoleh. Berbeda dengan informasi akuntansi manajemen sektor publik yang akurat, relevan dan handal akan memperoleh hambatan atau tantangan dengan tiga permasalahan pokok yaitu :

1. Efisiensi biaya (cost efficient) berarti mengusahakan meminimalisasi biaya rencana tercapai.
2. Kualitas produk (product quality), dengan biaya yang hemat kualitas produk yang diharapkan tinggi

3. Pelayanan (service), dengan biaya atau gaji yang redah diharapkan memberikan pelayanan yang baik.

Melihat ketiga hal diatas, muncul pertanyaan apakah mungkin dengan biaya yang rendah kualitas produk dapat lebih tinggi dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pengembangan dari akuntansi manajemen dalam perhitungan biaya dengan mengadopsi teknik perhitungan biaya yang diterapkan oleh perusahaan swasta yaitu : Teknik activity based costing, job costing, batch costing, standard costing.

b. Pemberian informasi Biaya.

Dalam akuntansi sektor publik, biaya dapat dikategorikan atas tiga kelompok, yaitu :

1. Biaya input, berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang menjadi biaya utama dalam perenvanaan keuangan sekaligus dala pengambilan keputusan.
2. Biaya proses, berupa pemisahan biaya berdasarkan fungsi dari organisasi sektor publik, misalnya : biaya departemen kesehatan, departemen pendidikann biaya SKPD di darah-daerah dan lain-lain.
3. Biaya output, yaitu biaya yang diperlukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen dalam hal ini pemakai . Yang paling utama dipehitungkan disini adalah pelayanan yang optimal dilihat dari : waktu penyampaian barang, mutu barang yang disampaikan, harga, tempat, distribusi dan teknik pelayanannya.

Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu :

1. Cost finding, yaitu diawali dengan mengakumulasi data biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan oleh pemerintah.
2. Cost recording, yaitu melakukan pencatatan data biaya ke dalam sistem akuntansi yang sudah disusun oleh pemerintah melalui standar akuntansi pemerintahan.
3. Cost analyzing, yaitu melakukan analisa biaya terhadap perilaku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat mengefisienkan biaya dalam membuat keputusan.
4. Cost reporting, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh sumberdaya manusia untuk menyusun laporan pertanggungjawaban biaya berdasarkan kalkulasi biaya selama pekerjaan proyek atau kegiatan selesai dilakukan. Laporan inilah yang menjadi fungsi utama dari akuntansi manajemen sektor publik. Laporan biaya merupakan evaluasi untuk mengukur kinerja pejabat atau lembaga publik dengan cara membandingkan perencanaan biaya dengan realisasi biaya untuk menentukan ada tidaknya efisiensi atau inefisiensi dan juga efektif atau non efektif. Laporan yang telah dibuat maka dapat menjadi pedoman untuk menyusun anggaran untuk tahun berikutnya.
5. Strategic cost management. Setelah membuat laporan dan menganalisa biaya, maka pejabat publik dapat menyusun strategi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sebuah anggaran untuk periode

berikutnya. Ada berbagai cara yang perlu dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong tercapainya penghematan biaya, antara lain :

- Menjadikan organisasi sektor publik menanamkan kebiasaan atau kultur biaya disetiap fungsi organisasi dalam jangka panjang.
- Berfokus pada pelayanan publik yang berkelanjutan yang selalu melakukan perbaikan secara terus menerus disetiap fungsi demi peningkatan pelayanan publik yang optimal.
- Ada niat yang serius dari pihak pejabat publik dengan tindakan yang proaktif untuk mendorong penghematan biaya.
- Keseriusan dari pejabat publik dalam menentukan program yang sangat mendesak demi tercapainya pelayanan publik yang optimal.

c. Penilaian investasi.

Akuntansi manajemen sektor publik dapat melakukan penilaian investasi dengan cara : identifikasi biaya, risiko dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Tujuan penilaian investasi adalah untuk menentukan apakah suatu investasi yang dilakukan itu layak atau tidak di dalam meningkatkan kesejahteraan publik. Ada berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penilaian, antara lain : tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko, dan ketidakpastian dan juga sumber pendanaan. Penilaian investasi disektor publik jauh lebih sulit dibandingkan dengan sektor swasta. Disamping cost financial yang diperhitungkan, juga cost socialnya yang sangat tinggi dan manfaat sosialnya sulit diprediksi karena menyangkut

kepentingan publik yang beraneka ragam yang memerlukan waktu dalam mengidentifikasinya.

d. Penganggaran

Akuntansi manajemen sektor publik berperan untuk memfasilitasi penyusunan anggaran yang efisien dan efektif. Ada beberapa fungsi atau manfaat penyusunan anggaran, yaitu :

- Sebagai alat perencanaan.
- Sebagai alat pengendalian.
- Sebagai alat kebijakan.
- Sebagai alat politik.
- Sebagai alat komunikasi dan koordinasi.
- Sebagai alat penilaian kerja.

e. Penentuan biaya pelayanan.

Penentuan biaya pelayanan termasuk menentukan tarif terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik kepada masyarakat merupakan hal yang sangat sulit. Syarat pelayanan harus: murah, berkualitas, cepat dan tepat waktu. Dengan berbagai metode yang dipakai di dalam ilmu akuntansi manajemen sektor publik, maka setiap biaya yang akan diperhitungkan untuk memberikan pelayanan kepada publik, akuntansi manajemen sektor publik dapat mendeteksinya.

f. Penilaian kinerja.

Akuntansi manajemen sektor publik dapat melakukan penilaian kinerja dari semua pejabat atau lembaga publik dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan. Ada beberapa alat ukurnya yang dipakai, misalnya : Ratio keuangan, balanced scorecard dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari berbagai hal yang dikemukakan mengenai akuntansi sektor publik dalam hal peranan akuntansi manajemen sektor publik, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang menjadi ringkasan tulisan ini, yaitu :

1. Akuntansi sektor publik merupakan pengganti mata kuliah akuntansi pemerintahan.
2. Pergantian mata kuliah ini diawali dengan munculnya reformasi pemerintahan dan keuangan negara (Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999).
3. Munculnya Undang-Undang tersebut terbentuklah otonomi daerah terbatas yang memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumberdaya yang dimiliki daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri.
4. Akuntansi sektor publik menginginkan laporan keuangan publik yang transparan , akuntabel dan akurat yang dapat dipercaya oleh publik melalui pengawasan yang dilakukan pihak internal pemerintah secara terbuka dan berkesinambungan secara terus menerus.
5. Bagian dari akuntansi sektor publik adalah akuntansi manajemen sektor publik, yang khusus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui pihak internal pejabat publik.
6. Fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan merupakan fungsi utama manajemen sektor publik yang

- pada prinsipnya harus benar-benar dilakukan oleh pejabat atau penanggungjawab publik.
7. Penerima amanah harus memberikan akuntabilitas publik, baik akuntabilitas publik horizontal maupun vertikal.
 8. Dalam menentukan biaya publik akuntansi sektor publik harus mengadopsi perhitungan biaya dengan sektor swasta dengan menambah metode yang lain yang dapat menghitung cost pelayanan publik termasuk cost social yang sulit menentukan karena mempunyai jangkauan yang cukup luas.
 9. Akuntansi manajemen sektor publik di Indonesia belum populer karena belum termasuk mata kuliah di Perguruan Tinggi secara terpisah dengan mata kuliah yang lain.
 10. Untuk mendukung akuntansi manajemen sektor publik harus diawali adanya akuntansi biaya sektor publik di pemerintahan.
 11. Akuntansi manajemen sektor publik belum berhasil membantu negara untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme..
 12. Belum sepenuhnya hukum dipakai sebagai alat untuk menetapkan seseorang itu bersalah atau tidak karena masih banyak dipengaruhi dengan berbagai kebijaksanaan untuk mengesampingkan penerapan hukum yang adil dan merata.

Saran

1. Akuntansi sektor publik yang sedang bergulir sekarang ini harus didukung semua pihak terutama pejabat publik agar benar-benar melaksanakan

- pemerintahan yang sifatnya terbuka, bebas dari semua kepentingan, serta akuntabel yang didukung dengan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun yang terlebih dahulu diperiksa oleh para pemeriksa yang independen, misalnya BPK, BPKP, Kantor akuntan Publik dan lain-lain
2. Akuntansi manajemen sektor publik salah satu syarat yang paling utama untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban publik yang sungguh-sungguh transparansi dan akuntabel serta objektivitas yang tinggi
 3. Akuntansi manajemen sektor publik dilaksanakan dan disusun oleh manajemen publik yang jujur, integritas, objektif dan penuh akurat yang dapat menjadikan laporan sangat dipercaya oleh pemegang kepentingan publik
 4. Dalam merekrut pejabat publik harus dilakukan pemilihan yang cukup teruji, akurat serta latar belakang ilmu pengetahuan yang cukup memadai
 5. Disarankan, untuk menghitung biaya publik yang efisien, efektif dan ekonomis bagi publik agar untuk ke depan dirancang ada satu mata kuliah : Akuntansi Biaya Sektor Publik di Perguruan tinggi Negeri
 6. Munculnya akuntansi sektor publik, sekurang-kurangnya dapat mengurangi korupsi dengan rumus:

$$K = M + B - A$$
 Keterangan :
 K = Korupsi.
 M = Monopoli'
 B = KeBijaksanaan.
 A = Akuntabilitas.

7. Dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, diminta semua pihak seperti : eksekutif, yudikatif, legislatif, masyarakat luas, masyarakat akademis dan juga pengusaha agar terus melakukan reformasi ekonomi, keuangan, pemerintahan, anggaran, sistem informasi akuntansi, audit, kelembagaan yang jujur dan akuntabel

Nordiawan, Deddi, Nordiawan, Akuntansi Sektor Publik, 2006. Salemba Empat, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

Renyowijoyo, Muindro, Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba, 2008, Mitra Wacana, Jakarta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah M, Soelaiman, 1996, Laporan Keuangan Sektor Publik Dalam Profesi Akun Indonesia menuju Milenium Baru, Prosiding KNA Ke-3 , Ikatan Akuntan Indonesia.

Akbar, Baharullah dan Siti Nurbaya, 2000, Akuntabilitas Daerah, Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya Dalam Rangka Otonomi Daerah.

Bastian, Indra, 2000, State of The Art Pendidikan Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, 2002,- Salemba Empat, Jakarta.

-----, Akuntansi Setor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, 2004,

Salemba Empat, Jakarta. Henley, et al, 1990, Public Sector Accounting and Financial Control, London.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2004, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2002, Andy, Yogyakarta.